

**PRASASTI-PRASASTI KERAJAAN SUNDA DI WILAYAH  
PINGGIRAN: TINJAUAN TEORI PANOPTICON**  
*INSCRIPTIONS OF KINGDOM OF SUNDA IN PERIPHERY AREA:  
A STUDY OF PANOPTICON THEORY*

**Muhamad Alnoza**

Program Magister Antropologi, Universitas Gadjah Mada  
muhamadalnoz@mail@ugm.ac.id

Naskah diterima 1-3-2021. Naskah direvisi 16-4-2022. Naskah disetujui 27-5-2022

**ABSTRACT**

*The Sunda Kingdom was a Hindu-Buddhist kingdom that ruled Western Java from the eighth century to the sixteenth century AD. The Sunda Kingdom is mainly represented through inscriptions supposedly discovered in the Sukabumi and Cirebon districts. As a result, it's assumed that the Sunda Kingdom once had an associative tie between Pakwan Pajajaran, the kingdom's center, and the surrounding suburbs. The content in the Sang Hyang Tapak and Huludayeuh inscriptions as a panopticon medium and the location of its discovery as a Sunda Kingdom suburb are discussed in this paper. This study project aims to recreate the Sunda Kingdom's center and peripheral districts during the reign of the king, which commissioned the Sang Hyang Tapak and Huludayeuh inscriptions. A qualitative research method was employed in this study. Through indicators of power discourse in the Sang Hyang Tapak and Huludayeuh inscriptions, new information on production areas and the borders of the Sunda kingdom might be discovered based on the research findings.*

**Keywords:** *Periphery Area; Kingdom of Sunda; Huludayeuh Inscription, Sang Hyang Tapak Inscription; Panopticon.*

**ABSTRAK**

Kerajaan Sunda merupakan negara yang bercorak kebudayaan Hindu-Buddha yang berdiri di Jawa Barat dan berkuasa selama abad ke-8 hingga abad ke-16 M. Kerajaan tersebut oleh para peneliti sebelumnya diperkirakan membentang dari Banten hingga sebagian wilayah barat Jawa Tengah pada masa kejayaannya (abad ke-16 M). Sebagai suatu negara yang besar, kerajaan ini berpusat di Kota Pakwan Pajajaran atau Bogor sekarang. Secara arkeologis, temuan-temuan yang berhubungan dengan Kerajaan Sunda utamanya berupa prasasti, rupanya juga ditemukan di daerah Sukabumi dan Cirebon. Oleh karena itu, muncul asumsi bahwa di masa lalu Kerajaan Sunda telah membangun hubungan asosiatif antara Pakwan Pajajaran sebagai pusat kerajaan dan daerah pinggiran di sekitarnya. Kajian ini dengan demikian mempermasalahkan bagaimana keterkaitan antara keterangan pada Prasasti Sang Hyang Tapak dan Huludayeuh sebagai media panopticon dengan lokus penemuannya sebagai suatu daerah pinggiran Kerajaan Sunda. Tujuan dari diajukannya permasalahan penelitian ini adalah untuk merekonstruksi daerah pusat dan pinggiran di Kerajaan Sunda pada masa pemerintahan raja yang mengeluarkan Prasasti Sang Hyang Tapak dan Huludayeuh. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat dijumpai informasi baru berupa indikasi keberadaan daerah produksi dan perbatasan Kerajaan Sunda melalui wacana kekuasaan pada Prasasti Sang Hyang Tapak dan Huludayeuh.

**Kata kunci:** Daerah Pinggiran; Kerajaan Sunda; Prasasti Huludayeuh; Prasasti Sang Hyang Tapak; Panopticon.

## PENDAHULUAN

Kerajaan Sunda adalah salah satu kerajaan bercorak kebudayaan Hindu-Buddha di Jawa. Kerajaan yang berkembang di wilayah Jawa bagian barat ini, diperkirakan telah eksis sejak abad ke-9 M. Dugaan tersebut didasarkan pada penemuan nama “Sunda” pada Prasasti Kebon Kopi II yang ditemukan di Bogor. (Djafar, 2014). Keterangan yang lebih jelas mengenai sejarah Kerajaan Sunda justru muncul dari manuskrip *Carita Parahyangan*. Menurut berita dari sumber tertulis tersebut, penguasa pertama yang berkuasa atas takhta Kerajaan Sunda adalah Trarusbawa (Munandar et al., 2011). Dikatakan bahwa Raja Trarusbawa merupakan pendiri dari ibu kota Kerajaan Sunda yang ia namai sebagai Pakwan Pajajaran (Lubis, 2013).

*Carita Parahyangan* turut pula menyebutkan bahwa ibu kota Kerajaan Sunda memiliki lima bangunan keraton. Lima bangunan tersebut dibangun sejajar, sehingga kemudian kota yang menaunginya disebut *pakwan pajajaran* atau “pusat pemerintahan yang berjajar”. Lima keraton tersebut masing-masing dikenal sebagai Keraton Bima, Punta, Narayana, Madura, dan Suradipati. Selurunya memiliki fungsinya masing-masing, sementara sang raja menetap di Keraton Suradipati yang paling mendekati Gunung Pangrango dan Salak. Adapun untuk keletakannya diperkirakan saat ini telah menjadi perkotaan yang dikenal sebagai Bogor (Budimansyah, 2019).

Sumber sejarah mengenai Kerajaan Sunda dan ibu kotanya didapati pula dari catatan asing, utamanya dari penjelajah Tome Pires yang datang ke Sunda di abad ke-16. Pires menyebut bahwa Raja Sunda yang berkuasa ketika itu bernama *Samiam* (Sang Hyang), dan berkedudukan di *dayoh*. Kerajaan ini oleh Pires digambarkan sebagai kerajaan yang kaya akan komoditas dagang,

sebagaimana tampak dari banyaknya pelabuhan yang Kerajaan Sunda kuasai kala itu. Pires mencatat bahwa Kerajaan Sunda ketika ia datang, memiliki kurang lebih enam pelabuhan yang tersebar di seluruh pantai utara Jawa bagian barat. Pelabuhan-pelabuhan itu di antaranya *Bantam* (Banten), *Cheguide* (Cigede), *Tamgaram* (Tangerang), *Calapa* (Sunda Kalapa/Jakarta), *Chemano* (Cimanuk), dan *Chereboam* (Cirebon). Melalui pelabuhan-pelabuhan tersebut, Kerajaan Sunda menyalurkan komoditas dagangnya seperti lada, tarum, dan kain, ke berbagai negara seperti Malaka, Benggala, Pegu, Siam, dan Cina (Cortesao, 2018). Kerajaan Sunda kemudian mengalami keruntuhan, setelah Kesultanan Banten yang dipimpin oleh Sultan Maulana Yusuf menggempur ibu kotanya di Pakwan Pajajaran (Tjandrasasmita, 2009b).

Terlepas dari panjangnya sejarah Kerajaan Sunda selama sekitar tujuh abad, terdapat beberapa tinggalan Kerajaan Sunda berupa prasasti yang ditemukan di luar ibu kota kerajaan tersebut (dalam hal ini Bogor). Temuan prasasti dari Kerajaan Sunda dan luar ibu kota, antara lain Prasasti Huludayeuh yang ditemukan di wilayah Kabupaten Cirebon dan Prasasti Sang Hyang Tapak dari wilayah Kabupaten Sukabumi. Keduanya prasasti yang ditulis dari masa yang berbeda, yaitu Prasasti Sang Hyang Tapak pada abad ke-11 M atau masa pemerintahan Raja Sri Jayabhupati Jayamanahen dan Prasasti Huludayeuh pada abad ke-16 M atau masa pemerintahan Raja Surawisesa<sup>1</sup> (Djafar, 1994; Djafar et al., 2016).

Penelitian terhadap Prasasti Sang Hyang Tapak dan Huludayeuh dari peneliti sebelumnya, kendati demikian lebih

<sup>1</sup> Sebenarnya terdapat prasasti lain yang berasal dari luar ibukota Kerajaan Sunda, yaitu Prasasti Kebantenan. Namun, karena prasasti yang berasal dari Bekasi ini terbuat dari logam, maka belum bisa dipastikan aslinya prasasti ini berasal darimana (sifatnya mudah dipindah-pindah)

banyak berfokus pada penelitian epigrafis dibandingkan dengan kajian tematik isi prasasti. Prasasti Sang Hyang Tapak misalnya pernah dikaji oleh C.M. Pleyte (1915), Saleh Danasasmita (2014), Hasan Djafar dkk. (2016), dan Agus Aris Munandar (2017). Danasasmita dan Munandar dalam penelitiannya sebatas menggunakan Prasasti Sang Hyang Tapak sebagai sumber sejarah dalam isu penelitian mereka yang lebih besar, sedangkan Pleyte dan Djafar dkk. lebih berfokus pada kajian epigrafi prasasti tersebut. Tidak jauh berbeda dengan Prasasti Sang Hyang Tapak, Prasasti Huludayeh pun baru dikaji oleh dua orang peneliti, yaitu oleh Hasan Djafar (1994) dan A. Gunawan & A. Griffiths (2021). Keduanya berfokus pada transliterasi Prasasti Huludayeh.

Fenomena tersebut tentu menjadi menarik, mengingat Kerajaan Sunda nyata-nyatanya telah menempatkan prasastinya di beberapa daerah pinggiran (*periphery*)-nya. Dengan demikian, perlu dipahami dulu konsep prasasti dan daerah pinggiran dalam kajian ini. Prasasti dalam hal ini perlu dipahami sebagai suatu maklumat atau perintah raja yang ditulis pada permukaan benda berbahan keras seperti batu, logam, atau kayu. Di dalam prasasti biasanya seorang raja memuat perintah yang berkaitan dengan kepentingan politik, ekonomi, sosial, dan bahkan agama (Boechari, 2012).

Menurut Nigel McKenzie (1977), konsep pinggiran (*periphery*) yang dalam hal ini bersanding dengan konsep *centre* (pusat), merupakan suatu metafora spasial dari pertemuan antara konsep imajinasi sosiologis dan kesadaran spasial. Merujuk pada pendapat Johan Galtung, McKenzie mengatakan bahwa daerah yang disebut ‘pinggiran’ dan ‘pusat’ sebenarnya adalah satu kesatuan, hingga pada suatu waktu terdapat suatu kuasa yang menimbulkan dominasi daerah pusat terhadap daerah pinggiran. Daerah pusat atas dominasinya

mengendalikan jaringan interaksi antardaerah pinggiran yang ada di sekitarnya. Stein Rokkan sebagaimana dikutip McKenzie menyebut bahwa wilayah pinggiran terkadang memiliki kuasa politik lebih besar dari pusat, sehingga bisa saja mengancam kuasa politik di pusat. Sebaliknya, wilayah pusat memiliki kuasa yang lebih besar dalam pengendalian ekonomi, sehingga wilayah pinggiran cenderung pada wilayah pusat di beberapa kasus.

Oleh karena erat kaitannya dengan kekuasaan, prasasti di daerah pinggiran dalam penelitian ini diposisikan sebagai panopticon. Konsep ini untuk kali pertama disampaikan oleh Jeremy Bentham, yang mendesain bentuk penjara melingkar dengan menara pengawas di tengah-tengah lingkaran penjara tersebut. Menara pengawas ini memiliki kemampuan visual yang menjangkau ke segala arah, sehingga seluruh penghuni penjara merasa sedang diawasi oleh menara tersebut. Michel Foucault kemudian menganalogikan bentuk penjara tersebut dengan konsep panopticon di ranah kontrol kekuasaan negara. Struktur panopticon oleh Foucault dianggap sebagai mekanisme di mana yang dikuasai diatur melalui suatu visibilitas konstan dari si penguasa, sehingga yang dikuasai akan senantiasa berbuat disiplin atau bertindak sesuai dengan kepentingan penguasa (Foucault, 1977; Kumar, 2015). Foucault menjelaskan bahwa konsep “disiplin” di sini memiliki prinsip kerja: “upaya yang dilakukan dengan daya serendah mungkin (secara ekonomi maupun politik) terhadap eksploitasi manusia melalui peningkatan ketaatan terhadap manusia yang diobjektifikasi itu” (Kaplan, 1995).

Penerapan teori panopticon dalam kajian arkeologi di Indonesia secara umum atau epigrafi secara khusus dapat dijumpai pada tulisan Nainunis Aulia Izza (2019). Dalam tulisan tersebut, Izza berfokus pada prasasti-prasasti *sapatha* (kutukan)

yang dikeluarkan oleh Kedatuan Śrīwijaya. Melalui penerapan teori panopticon, Izza dapat menjelaskan mengapa hampir seluruh prasasti yang dikeluarkan Śrīwijaya berkaitan dengan kutukan. Izza berpendapat bahwa prasasti-prasasti tersebut dilengkapi dengan kutukan, sebagai bentuk ancaman bagi warga daerah-daerah taklukan Śrīwijaya yang strategis untuk memberontak.

Berdasarkan penjabaran akan konsep prasasti dan daerah pinggiran di atas, dapat diasumsikan bahwa Prasasti Sang Hyang Tapak dan Huludayeuh memiliki keterkaitan dengan isu hubungan daerah pusat dan pinggiran. Kedua prasasti ini tentunya diletakan jauh dari luar ibu kota Pakwan Pajajaran dengan suatu alasan tertentu. Oleh karena itu, masalah yang hendak dijawab dalam penelitian ini adalah bagaimana keterkaitan antara keterangan pada Prasasti Sang Hyang Tapak dan Huludayeuh sebagai media panopticon dengan lokus penemuannya sebagai suatu daerah pinggiran Kerajaan Sunda. Tujuan dari diajukannya permasalahan penelitian ini adalah untuk merekonstruksi daerah pusat dan pinggiran di Kerajaan Sunda pada masa pemerintahan raja yang mengeluarkan Prasasti Sang Hyang Tapak dan Huludayeuh. Terlepas dari permasalahan yang diangkat dalam penelitian, kendati pun sama-sama mengkaji kondisi politik masa Hindu-Buddha, kebaruan penelitian ini dibandingkan dengan penelitian sebelumnya adalah penggunaan konsep daerah pinggiran.

## **METODE**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode tersebut dalam studi sosial humaniora dianggap mampu memberi gambaran mengenai konstruksi makna, pengalaman hidup seseorang, ritual kebudayaan, ataupun praktik opresif dari suatu masyarakat. Secara umum, metode kualitatif yang diaplikasikan

pada penelitian ini terdiri atas tiga tahapan, yaitu pengumpulan data, analisis, dan interpretasi (Atkinson, 2017).

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan di Jakarta pada bulan Februari 2022, dengan metode studi kepustakaan. Penelaahan kepustakaan tersebut dilakukan pada sumber-sumber penelitian terdahulu, utamanya yang menyinggung soal riwayat penemuan dan transliterasi Prasasti Sang Hyang Tapak dan Huludayeuh sebagai data primer. Adapun sumber-sumber penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai sumber data acuan penelitian ini adalah hasil penelitian H. Djafar dkk. (2016) mengenai inventarisasi prasasti koleksi Museum Nasional dan A. Gunawan & A. Griffiths (2021) mengenai Prasasti Huludayeuh. Sebagai bahan perbandingan, data sekunder yang digunakan adalah hasil penelitian mengenai prasasti lain serta sumber sejarah lain mengenai Kerajaan Sunda seperti manuskrip kuna.

Analisis yang digunakan berupa analisis deskriptif. Pada tahapan ini, seluruh data (baik primer maupun yang sekunder) dideskripsikan secara rinci. Adapun variabel yang digunakan dalam mendeskripsikan data, terdiri atas deskripsi prasasti data primer, lokus penemuannya, dan konteks sejarah serta lingkungan dari lokus penemuan prasasti yang dijadikan sebagai data primer.

Interpretasi dalam penelitian ini menerapkan metode analogi. Metode ini diterapkan dengan membandingkan keterangan pada prasasti dengan sejarah lingkungan tempat penemuannya dengan konteks sudut pandang panoptisisme. Hasil dari proses analogi tersebut adalah berupa pola yang dijadikan kesimpulan dari penelitian ini.

## PEMBAHASAN

### Gambaran Ibu Kota Pakwan Pajajaran sebagai Pusat Kerajaan Sunda

Sumber sejarah yang mendasari pengetahuan para peneliti sekarang dalam menggambarkan ibu kota Kerajaan Sunda, umumnya berasal dari sumber tertulis Kerajaan Sunda. Sumber tertulis tertua berasal yang menjadi acuan dalam menggambarkan bentuk fisik ibu kota Pakwan Pajajaran adalah Prasasti Batu Tulis (1521 M). Prasasti tersebut berisi perihal beberapa fasilitas yang dibangun di Kota Pakwan Pajajaran, seperti parit dan jalan-jalan yang diperkeras (Djafar, 2011). Sumber yang berasal dari masa yang lebih kemudian adalah *Carita Parahyangan*. Manuskrip berbahasa Sunda Kuno yang diperkirakan ditulis abad ke-16 M itu, melampirkan keterangan mengenai sejarah pembangunan dan perkembangan ibukota Pakwan Pajajaran (Budimansyah et al., 2018). Sumber sejarah dari Kerajaan Sunda yang lain mengenai Pakwan Pajajaran berasal pula dari manuskrip *Bujangga Manik* yang ditulis pada abad ke-15 atau ke-16 M. Manuskrip tersebut berisi catatan perjalanan seorang pangeran Sunda bernama Ameng Layaran, yang mana di salah satu bagiannya sedikit banyak menggambarkan ibu kota Kerajaan Sunda sebagai tempat di mana ia dibesarkan (Noorduyn, 2019).

Pakwan Pajajaran untuk kali pertama dibangun oleh Raja Trarusbawa pada sekitar abad ke-7 sampai ke-8 M. Angka tahun tersebut pada hakikatnya bukan berasal dari *Carita Parahyangan*, mengingat memang manuskrip tersebut tidak pernah menyebut angka tahun pembangunan ibukota Kerajaan Sunda. Namun demikian, *Carita Parahyangan* menyebut bahwa Trarusbawa memiliki seorang menantu bernama Sanjaya (Rakeyan Jamri). Tokoh tersebut oleh para sejarawan dan para ahli epigrafi, dianggap identik dengan Raja Sanjaya yang disebut

di dalam Prasasti Canggal (654 Ś/ 732 M) (Munandar et al., 2011; Poesponegoro & Notosusanto, 2010). Teori pengidentifikasian tokoh Sanjaya, didasarkan pada temuan kesamaan cerita hidup tokoh tersebut pada *Carita Parahyangan* dan Prasasti Sangkhara dari Jawa Tengah. Kedua sumber tertulis sama-sama mengisahkan anak dari Sanjaya yang bernama Rakai Panangaran (di dalam *Carita Parahyangan* disebut Rake Panaraban), yang mana ia telah berpindah agama karena kematian ayahnya (Griffiths, 2021). Terlepas dari identifikasi tokoh Sanjaya, dapat diperkirakan bahwa masa hidup Trarusbawa pun tidak begitu jauh dari masa hidup Sanjaya yang paling tidak sudah eksis pada tahun 732 M. Dengan demikian ibu kota, dapat diperkirakan bahwa Pakwan Pajajaran juga telah dibangun pada tahun tersebut.

Mengenai wujud fisik dari Pakwan Pajajaran, diperkirakan kota tersebut berdiri di atas lahan yang menjadi Kota Bogor sekarang. Menurut Danasasmita (2014), nama Pakwan Pajajaran diambil dari bahasa Sunda Kuno, yang berarti “kubu kekuasaan yang berjajar”. Pandangan ini didasarkan pada kenyataan yang digambarkan oleh *Carita Parahyangan*, yang memang menggambarkan Kota Pakwan Pajajaran dengan lima keraton (*panca prasada*) (Zakaria, 2012). Keraton-keraton tersebut di antaranya bernama Keraton Bima, Punta, Narayana, Madura, dan Suradipati. Menurut Munandar et al. (2011), Keraton Bima berfungsi sebagai tempat tinggal para tentara, Keraton Punta berfungsi sebagai tempat berkumpulnya para abdi, Keraton Narayana berfungsi sebagai pusat kesenian, Keraton Madura berfungsi sebagai tempat para pejabat menghadap raja, dan Keraton Suradipati berfungsi sebagai tempat raja beserta keluarganya bermukim. Adapun selain dari lima keraton yang telah dijelaskan, Kota Pakwan Pajajaran juga dilengkapi dengan alun-alun, pusat

perekonomian (pasar), gerbang kota, pusat peribadatan, pusat pendidikan, dan juga hutan kota (Budimansyah, 2019).

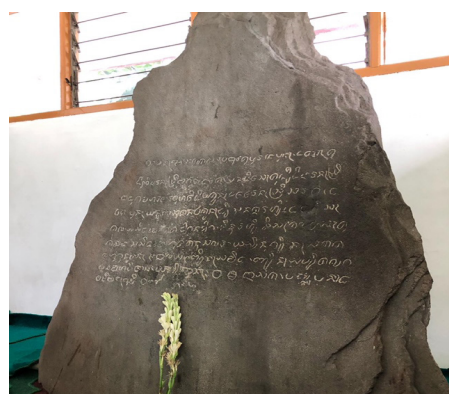
Secara kesejarahan, selain dari sumber tertulis yang berasal dari Kerajaan Sunda sendiri, Ibu Kota Pakwan Pajajaran juga disebut dalam catatan asing. Berita asing yang paling awal menyebut soal Kota Pakwan Pajajaran, berasal dari Tome Pires yang datang ke kota tersebut pada abad ke-16. Pires bersama rombongan Portugis dari Malaka, kala itu hendak menjalin hubungan persekutuan dengan Kerajaan Sunda yang terancam posisinya oleh Kerajaan Demak dan Cirebon (Darsa, 2020). Pires menggambarkan Ibu Kota Sunda yang ia sebut *dayoh* itu dalam kalimat sebagai berikut:

*“Kota Dayo adalah tempat dimana raja paling banyak menghabiskan waktunya dalam setahun. Kota besar ini memiliki rumah-rumah yang dibangun dengan baik menggunakan daun kelapa dan kayu. Orang-orang berkata bahwa sang raja memiliki rumah yang sangat bagus, dibangun menggunakan 330 pilar kayu setebal tong anggur, setinggi 5 depa dan dihiasi ukiran yang sangat bagus di bagian atasnya. Perjalanan ke kota ini memakan waktu dua hari dari pelabuhan utama mereka yang bernama Calapa (Sunda Kelapa). Sang raja adalah seorang atlet dan pemburu yang berbakat. Di negerinya terdapat rusa jantan, babi dan banteng yang tak terhitung banyaknya. Mereka sering menghabiskan waktu dengan berburu. Sang raja memiliki dua permaisuri yang berasal dari kerajaannya sendiri, serta lebih dari seribu selir. Masyarakat Sunda terkenal akan kejujurannya. (Cortesao, 2018, pp. 206–207).*

Berita asing yang lebih muda muncul dari catatan VOC, yang di tahun 1687 (dipimpin oleh Scipio) dan 1690 (dipimpin

oleh Adolf Winkler) mulai mengeksplorasi wilayah selatan Batavia atau daerah Bogor sekarang. Selama penjelajahannya, Scipio dan Winkler menemukan suatu lahan yang diduga sebagai bekas dari suatu pemukiman. Baik Scipio dan Winkler, sama-sama mendapati suatu lahan terbuka mirip alun-alun, jalan-jalan setapak yang berpola, dan seongkah prasasti lengkap dengan arca-arca antropomorfik di sekitar daerah yang mereka jelajahi. Penemuan kedua penjelajah tersebut mengindikasikan bekas reruntuhan Ibu Kota Pakwan Pajajaran yang telah dihancurkan oleh Sultan Maulana Yusuf dari Banten pada tahun 1579 (Niemeijer, 2015).

Secara arkeologis, beberapa temuan yang sampai sekarang masih dapat ditemui di Bogor, menjadi bukti dari eksistensi Kota Pakwan Pajajaran di Bogor. Temuan data arkeologi di daerah Bogor (melingkupi wilayah administratif kota dan kabupaten Bogor) di antaranya ada yang berupa prasasti, menhir, batu dakon, dolmen, dan arca tradisi megalitik (sebelumnya disebut arca polinesia atau arca tipe pajajaran). Konsentrasi dari beberapa temuan arkeologis di Bogor, terpusat di Kawasan Batu Tulis, Ciawi, Ciampea, dan Pasir Angin (Mulia, 1977).



Gambar 1. Prasasti Batu Tulis, Kawasan Batu Tulis, Kota Bogor. Sumber: Dokumentasi Penulis



Gambar 2. Arca Situs Ranggapati, Kawasan Batu Tulis, Kota Bogor. Sumber: Dokumentasi Penulis

### Prasasti Sang Hyang Tapak

Prasasti ini dikenal pula dengan nama Prasasti Jayabhupati atau Cicatih. Secara umum Prasasti Sang Hyang Tapak ditemukan dalam keadaan parah empat bagian, yang seluruhnya sekarang disimpan dan menjadi koleksi di Museum Nasional, Jakarta. Oleh museum tersebut, masing-masing fragmen diberi nomor inventaris D.73, D.96, D.97, dan D.98. Berkaitan dengan lokasi penemuannya, fragmen D.73 ditemukan di sekitar aliran Sungai Cicatih, Cibadak, Kabupaten Sukabumi, sedangkan fragmen lainnya ditemukan di Pasir Pangcalikan, Bantarmuncang, Kabupaten Sukabumi. Aksara yang diterakan pada permukaan keempat fragmen prasasti berjenis aksara Jawa Kuna. Uniknya, walaupun termasuk ke dalam jenis aksara yang sama, gaya penulisan masing-masing prasasti memiliki perbedaan. Aksara prasasti D.73, D.96, dan D.97 (kemudian disebut Prasasti Sang Hyang Tapak I) terkesan lebih tebal dan lebih besar, dibandingkan dengan aksara prasasti D.98 (kemudian disebut Prasasti Sang Hyang Tapak II) yang tipis dan sudah sedikit aus. Adapun bahasa yang digunakan pada prasasti

ini adalah bahasa Jawa Kuna, dan dibaca sealur dari D.73-D.96-D.97-D.98.



Gambar 3. Prasasti Sang Hyang Tapak D. 97, Koleksi Museum Nasional Jakarta. Sumber: Dokumentasi Penulis



Gambar 4. Prasasti Sang Hyang Tapak D. 98, Koleksi Museum Nasional Jakarta. Sumber: Dokumentasi Penulis

Berikut merupakan hasil transliterasi dari Prasasti Sang Hyang Tapak secara utuh:

Prasasti Sang Hyang Tapak I (D.73-D.96-D.97)

Alihaksara:

“Swasti śaka warṣātita 952  
kārttikamāsa tithi dwādaśi śuklapakṣa  
ha ra wara tambir irikā diwāsanira  
prahajyan sunḍa maharaja śrī jaya-  
bhūpati jayamanahēn wiṣṇumurrti  
samarawihaya śakalabhūwana maṇḍa-  
leśwaranindita harogowardhana  
wikramotuṅgadewa magaway tēpēk  
i pūrwwa saṅhyaṅ tapak ginaway  
denira śrī jayabhūpati prahajyan

*suṇḍa mwaṅ tan hanani barrya barrya  
sila irikāṅ lwaḥ tan paṅalapa ikāṅ  
sesini lwaḥ makahīnan saṅhyaṅ tapak  
watēs kapūjān i hulu i sor makahīnan  
i saṅhyaṅ tapak watēs kapūjān i wuṅkal  
lagoṅ kālih mataṅyan pinagawayakēn  
prasāsti pagēpagēh maṅmaṅ sapaṭha  
sumpaḥ denira prahajyan suṇḍa lwirṅa*  
(Djafar et al., 2016, pp. 101–103)

Alihbahasa:

“Selamat tahun 952 Saka, bulan Kartika tanggal 12 bagian terang hari Hariyang-Kaliwon-Ahad wuku Tambir. Inilah saat raja Sunda Maharaja Sri Jayabupati Jayamanahen Wisnumurti Samarawijaya Sakalabuwamaneswaranindita Harogowardana Wikramotunggadewa membuat tanda di timur sanghyang tapak. Dibuat oleh Sri Jayabupati, Raja Sunda, dan jangan ada yang melanggar ketentuan di sungai ini. Jangan ada yang menangkap ikan di bagian sungai ini mulai dari batas daerah kabuyutan Sanghyang tapak di bagian hulu sampai batas daerah kabuyutan Sanghyang tapak di bagian hilir pada dua buah batu besar. Untuk tujuan tersebut telah dibuat piagam yang dikukuhkan dengan seruan, kutuk serta sumpah oleh Raja Sunda yang bunyi lengkapnya demikian” (Munandar, 2017, pp. 173–178).

Prasasti Sang Hyang Tapak II (D.98)

Alihaksara:

*“nihan indah ta kita kamuṅ hyaṅ hāra  
agaṣṭi pūrbba dakṣiṇa paścima utara  
madya agniya neriti byabya aiśanya  
urddhādaḥ rawi śaśi patala jala pāwaṅa  
hutāsāpaḥ bhayu akāśa teja saṅhyaṅ  
mahorātra saddhya dwaya yakṣa  
rakṣasa piśāca preta sura garuḍa graha  
kinara manoraga catwwara lokapāla  
yama baruna kuwera baśawa mwaṅ  
putra dewata panca kuśika nandiśwara*

*mahākala durggādewi anata surindra  
anakta hyaṅ kalamṛtyu gaṅa bhūta  
saṅprasiddha milu manrīra umasuki  
sarwwajanma ata rēgnayakēn ikiṅ  
sapāṭha samaya sumpaḥ pamaṅmaṅ ni  
lēbu paduka haji i sunda i ri kita kamuṅ  
hyaṅ kabeh .... pakādya umalapa ikaṅ  
... i saṅhyaṅ tapak ya patyananta  
ya kamuṅ hyaṅ denta patiya siwak  
kapalaṅa cucup utēkṅa bēlah dadaṅa  
inum rahṅa rantan ususṅa wēkasakēn  
prānāntika .... i saṅhyaṅ kabeh tāwat  
hana wwoṅ bari bari śila irikaṅ iwak  
i saṅhyaṅ tapak apan iwak apan  
parṅṅahṅa kapaṅguh i saṅ hyaṅ ....  
manēh kaliliran paknaṅa katēke dlaha  
ning dlaha .... paduka haji i sunda  
.... makna kadarma ... iṅ samaṅkana  
wetkawet paduka haji i sunda  
saṅgumanti riṅ kulit i kata kamaṅ iṅ  
kanaṅ .... i saṅ hyaṅ tapak maka tēpa  
lwaḥ watēsṅa i hulu i saṅhyaṅ tapak i  
..... i hilir mahiṅan irikaṅ .... umpi iṅ  
wuṅkal gde kalih .. wruḥhanta kamuṅ”*  
(Djafar et al., 2016, p. 104).

Alihbahasa<sup>2</sup>

“Sumpah ini hendaknya diperhatikan, wahai kamu sekalian Hyang Siwa, Agastya, timur, selatan, barat, utara, tenggara, barat daya, barat laut, timur laut, zenith, nadir, matahari, bulan, bumi, air, angin, api, sungai, kekuatan, angkasa, cahaya, sanghyang, malam, senja, Yaksa, Raksasa, Pisaca (sebangsa peri), Sura, Garuda, buaya, Kinara, Naga keempat pelindung dunia, Yama, Baruna, Kuwera, Besawa dan putra dewata Pancakusika, lembu tunggangan Siwa, Mahakala, Dewi Durga, Ananta, Surindra, putera Hyang

<sup>2</sup> Mulai dari bagian ini, peneliti terdahulu melakukan beberapa kesalahan alihbahasa. Penulis kemudian mencoba pula mengalihbahasakan prasasti D.98 dengan berpedoman pada kamus bahasa Jawa Kuno- Indonesia karya P.J. Zoetmulder (1982)

Kalamercu, Gana, Buta, para arwah semoga ikut, menjelma merasuki semua orang. Kalian gerakkanlah supata, janji, sumpah dan seruan raja Sunda ini. Di para dewata... lalu mengambil di... di Sang Hyang Tapak. Sungguh para dewata (akan) membunuh dengan memenggal kepalanya, menghisap otaknya, membelah dadanya, meminum darahnya, mengurai ususnya, menghabisi hidupnya.... sang hyang semua, jika ada orang memandang remeh larangan aturan (memancing) ikan di Sang Hyang Tapak, sebab menyajikan ada di Sang Hyang... diriku keturunan. Makanannya sampai akhir...Paduka haji (raja) di Sunda...berbuat kebaikan... pada waktu itu keturunan paduka raja di Sunda mengganti uraian aturan di sini...di Sang Hyang Tapak batasnya meliputi: di hulu di Sang Hyang Tapak di...di hilir Mahingan (*kabuyutan*) di sana... sampai di dua batu besar.... ketahuilah (oleh) kamu” (Pleyte, 1915, pp. 208–211)

Sebagaimana tergambarkan dari hasil alih aksara dan alih bahasa di atas, struktur penulisan Prasasti Sang Hyang Tapak dapat dibagi menjadi beberapa bagian, utamanya bagian Prasasti Sang Hyang Tapak I dan II. Prasasti Sang Hyang Tapak I diawali dengan bagian *titimangsa* atau penanggalan, di mana secara garis besar Prasasti Sang Hyang Tapak dikeluarkan pada tahun 952 Ś/ 1030 M. Adapun angka tahun ini diikuti pula dengan nama raja yang mengeluarkan prasasti, yaitu Śrī Jayabhūpati Jayamanahēn Wiṣṇumurrti Samarawihaya Śakalabhūwana Maṇḍaleśwaranindita Harogowardhana Wikramotuṅgadewa,

Bagian prasasti selanjutnya adalah *sambanda* atau pelampiran nama raja beserta perintah yang ia keluarkan, yang mana di dalam Prasasti Sang Hyang Tapak *sambandha*

yang diberikan berupa pelarangan memancing di daerah aliran sungai di sekitar *kabuyutan* Sang Hyang Tapak. Mahiang oleh beberapa peneliti sebelumnya juga disamakan dengan *kabuyutan*. Konsep *kabuyutan* pada dasarnya memiliki makna yang dalam luas dalam kebudayaan Sunda. Menurut Jakob Sumardjo (2019), *kabuyutan* berasal dari kata “*buyut*” yang dalam bahasa Sunda berarti “terlarang” atau “tabu”. *Kabuyutan* dalam konteks lebih umum bisa berarti tempat pembelajaran, tempat ibadah, atau tempat-tempat publik lain yang dianggap sakral (Perdana & Wahyudi, 2020). Apabila merujuk pada kata “*mahiang*” di dalam Prasasti Sang Hyang Tapak, agaknya kata yang berasal dari akar kata “*hyang*” (dewa) itu merujuk pada fungsi *kabuyutan* sebagai tempat peribadatan.

Prasasti Sang Hyang Tapak II di sisi yang lain berisi tentang *manggala* dan *sapatha*. Menurut Trigangga (2015), *manggala* adalah seruan penulis prasasti yang diundang sebagai saksi dari dikeluarkannya suatu prasasti. *Sapatha* dalam hal ini merupakan kutukan yang diberikan seorang pemberi perintah prasasti, yang fungsinya sebenarnya berkenaan dengan ancaman bagi siapa saja yang melanggar perintah dari suatu prasasti.

Sebagaimana tersirat dari transliterasi uraian Prasasti Sang Hyang Tapak II, *manggala* dari prasasti tersebut tidak seluruhnya menyebut dewata saja. Disebutkan pula beberapa makhluk gaib dalam kepercayaan Hindu, yang berada di luar dari alam kahyangan yang dikuasai para dewa, seperti makhluk gana, aśura, raksasa, para peri, makhluk tunggangan para dewa (*wahana*), dan lain sebagainya. Adapun nama dewa yang diseru terdiri pula atas beberapa kelompok, seperti *trimurti* (tiga dewa tertinggi dalam ajaran Hindu), *pancamahabuta* (lima dewa unsur alam), dan *astadikpalaka* (delapan dewa penjaga mata angin). Merujuk dari pendapat Ratnaesih Maulana (1994), *manggala* dari Prasasti Sang Hyang Tapak II bisa dibilang

tergolong lengkap, mengingat lazimnya suatu prasasti hanya menyeru salah satu dari unsur yang telah disebutkan di atas.

Bagian *sapatha* yang dilampirkan pada Prasasti Sang Hyang Tapak II, kendati tidak terbaca secara lengkap, tetapi masih menyisakan beberapa kalimat yang mengindikasikan suatu *sapatha*. Kalimat kutukan tersebut secara umum menggambarkan ancaman, bahwa barangsiapa yang melanggar perintah di dalam Prasasti Sang Hyang Tapak I maka akan dibunuh oleh para dewata. Prasasti Sang Hyang Tapak II bahkan menggambarkan proses “eksekusi” dari *sapatha* tersebut, yaitu dengan dipenggal kepalanya, dihisap otaknya, dibelah dadanya, diminum darahnya, dan diurai ususnya.

Satu bagian lain yang patut menjadi perhatian lebih lanjut adalah uraian yang kalimatnya terpotong-potong pada bagian setelah *sapatha* Prasasti Sang Hyang Tapak II. Selain daripada disampaikannya batas-batas wilayah larangan di sekitar *kabuyutan* Sang Hyang Tapak, bagian akhir prasasti juga melampirkan kalimat “pada waktu itu keturunan paduka raja di Sunda mengganti uraian aturan di sini”. Kalimat ini mengindikasikan bahwa Sri Jayabhupati bukanlah tokoh tunggal yang mengeluarkan Prasasti Sang Hyang Tapak, melainkan ada pula keturunannya yang berusaha “mengganti” perintah yang ia keluarkan. Indikasi ini dibahas lebih lanjut pada subbab berikutnya.

### Prasasti Huludayeuh

Prasasti ini ditemukan kali pertama di Desa Bobos (waktu pertama kali ditemukan masuk wilayah Desa Cikalahan), Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon. Sampai dengan dilakukannya penelitian ini, Prasasti Huludayeuh disimpan secara *in situ* (di tempat ditemukannya). Prasasti Huludayeuh secara umum berbahan dasar batu, dengan bentuk menyerupai menhir

atau tonggak. Pembacaan pertama dilakukan oleh Hasan Djafar pada tahun 1991, namun baru dipublikasikan tiga tahun kemudian. Kondisi prasasti ditemukan dalam keadaan baik, kendati terdapat beberapa aksara dari prasasti yang telah aus. Prasasti ini ditulis dalam bahasa Sunda Kuna, dan aksara Sunda Kuna bergaya Jawa Kuna (Djafar, 1994). Berikut merupakan alihaksara dan alihbahasa Prasasti Huludayeuh:

Alihaksara:

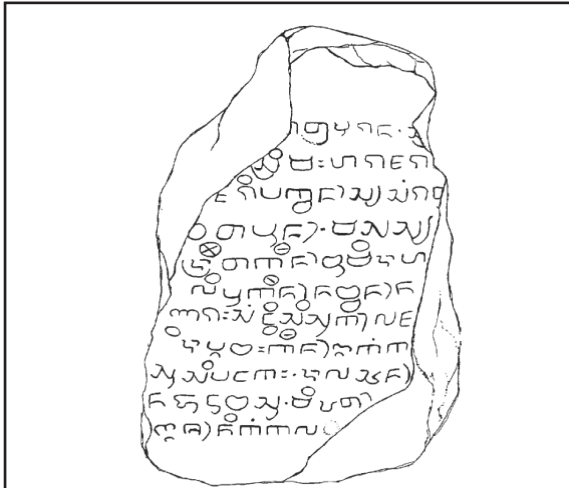
“...(ra)tu (na)rana, (ta) ..... sri mah(ha)ra(ja) ra(t)[u] [ha](j)[i] ri pakwan-sya saŋ ra(t)[u] [de]vata pun-, masa sya nr̥etakēn· bumi naha- li<m>pukēn-na bvanna n̄uruh sam̄ (di)si suk-laja(t) i nar̄buhkēn· Ikaŋ kayu si p̄<n>dakah, nalan- na Udubasu, mipatikēn-n ikaŋ kala”

Alihbahasa<sup>3</sup>:

“...ratu (raja) yang bernama...Sri Maharaja Ratu Haji di Pakwan. Ia lah Sang Ratu Dewata<sup>4</sup>. Ketika ia membuat dunia makmur, (dan) bumi menjadi selaras, (dengan) memerintahkan di Sukajati untuk menumbangkan pohon berdahan yang lebar, mengusir Udubasu, (dan) membunuh Kala (Gunawan & Griffiths, 2021, pp. 176–178).

<sup>3</sup> Setelah melalui terjemahan bebas bahasa Inggris (bahasa asli sumber yang diacu) ke bahasa Indonesia

<sup>4</sup> Nama ini merujuk pada Raja Sunda yang bergelar Sri Baduga Maharaja Ratu Haji di Pakwan Pajajaran, sebagaimana terlampir di dalam Prasasti Batu Tulis (1521), Prasasti Kebantenan (tidak berangka tahun), dan manuskrip *Carita Parahyangan* (Djafar, 1994)



Gambar 5. Faksimil Prasasti Huludayeuuh, Bobos, Kabupaten Cirebon.  
Sumber: Hasan Djafar

### Prasasti sebagai Media Panopticon dan Wacana Kekuasaan di Wilayah Pinggiran Kerajaan Sunda

Apabila ditinjau dari keletakan dua prasasti di wilayah pinggiran Kerajaan Sunda sebagaimana dideskripsikan di atas, terdapat perbedaan karakteristik geografis yang kentara. Wilayah Sukabumi sebagai lokasi penemuan Prasasti Sang Hyang Tapak lebih condong termasuk ke dalam wilayah pegunungan selatan Jawa Barat. Formasi pegunungan ini membentang dari wilayah Cilacap di Provinsi Jawa Tengah, hingga ke wilayah Pelabuhan Ratu dan Jampang yang merupakan perbatasan Provinsi Jawa Barat dan Banten (van Bemmelen, 1949). Wilayah pantai selatan Jawa, secara tradisional tidak pernah dilayari, mengingat terlalu kuatnya gelombang Samudra Hindia. Pelayaran di wilayah Sukabumi pada khususnya, baru berlangsung pada tahun 1960-an. Pelayaran dilakukan oleh masyarakat Bugis yang berdiam di sana, dengan mata pencaharian utama adalah nelayan *jagang* (Rosyandi et al., 2019). Sukabumi namun demikian merupakan wilayah yang subur. Gunung Salak dan Pangrango yang kaya dengan air,

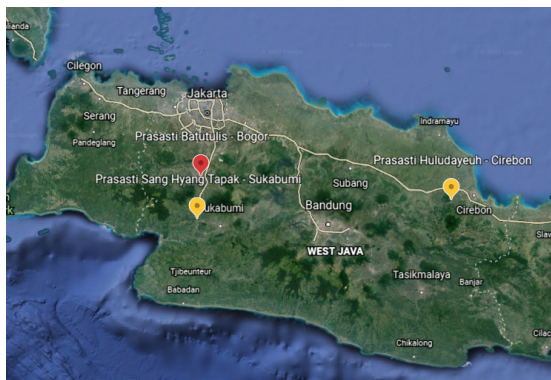
telah mengalirkan beberapa sungai yang kaya akan mineral. Tanah di Sukabumi kaya akan kandungan organosol, litosol, dan aluvial. Kondisi tersebut membuat Sukabumi potensial untuk menjadi daerah bercocok tanam. Sumber daya lahan yang subur juga didukung dengan luasnya hutan, sehingga sumber daya hutan juga amat tercukupi di wilayah ini. Secara geografis, wilayah Sukabumi juga berdekatan dengan pegunungan selatan Banten yang sejak lama dikenal sebagai penghasil emas dan logam (Rudini, 1992).

Lokasi penemuan Prasasti Huludayeuuh atau wilayah Cirebon dalam hal ini lebih berasosiasi dengan kawasan lembah kaki Gunung Ciremai di pantai utara Jawa. Berbeda dengan Sukabumi, Cirebon sejak dahulu merupakan pelabuhan yang ramai disambangi para pelaut dan pedagang. Manuskrip *Carita Purwaka Caruban Nagari* menggambarkan dengan jelas kondisi Cirebon yang ketika itu memiliki tiga tempat membuang sauh kapal-kapal dari berbagai negara, seperti Amparan Jati dan Muara Jati. Dikatakan bahwa pelabuhan Cirebon kala itu dilengkapi dengan menara pengawas, yang mana dibangun oleh para pelaut Cina atas pengawasan syahbandar setempat (Tjandrasasmita, 2009a).

Catatan Tome Pires sebagaimana dilaporkan dalam *Suma Oriental* menyatakan bahwa paling tidak terdapat dua pelabuhan besar di sekitar Cirebon. Pelabuhan tersebut di antaranya *Chemano* (Cimanuk) dan *Chereboam* (Cirebon). Menurut Pires, wilayah ini menghasilkan kayu dengan kualitas yang baik (Cortesao, 2018). Dapat diperkirakan bahwa kayu yang dimaksud Pires ini adalah kayu jati (*Tectona grandis*) yang memang terkenal dibudidayakan secara tradisional di Cirebon dan sekitarnya.

Secara arkeologis, masyarakat Cirebon masa Hindu-Buddha juga meninggalkan beberapa temuan berupa sisa bangunan.

Tinggalan sisa bangunan ini dapat dijumpai di wilayah Sambimaya, Indramayu (sebelah barat Kabupaten Cirebon). Tinggalan-tinggalan tersebut tersebar di beberapa “blok”, yaitu Buyut Mawur, Dingkel, Randu, dan Sambilawang. Sisa-sisa bangunan berupa struktur bata ini, ditemukan beserta dengan artefak lain seperti keramik Cina dari Dinasti Ming hingga Qing. Oleh karena itu, dapat diidentifikasi bahwa bekas bangunan tersebut berasal dari abad ke-13 hingga abad ke-16 M (Saptono et al., 2020).



Gambar 6. Sebaran prasasti Kerajaan Sunda di Pusat (pin point berwarna merah) dan Pinggiran (pin point berwarna kuning). Sumber: Google Earth (dengan modifikasi penulis)

Setelah ditemui beberapa keterangan mengenai sejarah lokasi penemuan prasasti-prasasti daerah pinggiran Kerajaan Sunda, pertanyaan selanjutnya tentu adalah mengapa raja Sunda menempatkan prasastinya di lokasi dengan karakteristik lingkungan yang amat berbeda? Apabila merujuk pada pendapat Madan Sarup (2008), dalam pembahasannya mengenai hakikat kekuasaan menurut Foucault, bahwa sesungguhnya para penguasa memanfaatkan ilmu pengetahuan sebagai media pencetak kekuasaan atas mereka yang dikuasainya Panopticon pada dasarnya merupakan upaya penginternalisasian ilmu pengetahuan ini, agar muncul sikap disiplin dari orang-orang yang berada di bawah suatu kekuasaan. Ilmu pengetahuan

yang menginternalisasi ini oleh Foucault erat kaitannya dengan konsep “wacana”. Berdasarkan pemahaman ini, uraian pada kedua prasasti yang dibahas dalam penelitian ini mengandung pengetahuan “mapan,” yang oleh Raja Sunda diharapkan mampu menginternalisasi di dalam diri rakyatnya agar muncul suatu disiplin.

Pada kasus Prasasti Sang Hyang Tapak, pesan utama yang hendak disampaikan erat kaitannya dengan larangan pemanfaatan lahan di sekitar *kabuyutan*. Fenomena ini serupa dengan apa yang oleh para ahli epigrafi kenal dengan konsep *simā*. Menurut Timbul Haryono (1999), *simā* merupakan daerah perdikan bebas pajak yang diberikan oleh seorang raja terhadap rakyatnya. Sebagai gantinya, rakyat diwajibkan memelihara monumen atau fasilitas yang dibangun oleh raja di atas tanah tersebut, seperti bangunan suci, sawah, bendungan, dan lain sebagainya.

Merujuk pada pendapat tersebut, jelas bahwa pada dasarnya Prasasti Sang Hyang Tapak, digunakan oleh Raja Sunda sebagai media kekuasaan atas lahan yang disebut sebagai *kabuyutan*.

Mengenai asumsi di atas, terdapat beberapa argumen yang dapat menguatkan hal tersebut. Pertama, Prasasti Sang Hyang Tapak bukanlah satu-satunya prasasti *simā* yang ditemukan di wilayah selatan Jawa bagian Barat, yang mana dalam hal ini adalah Prasasti Gegerhanjuang (1333 □/ 1411 M). Prasasti yang ditemukan di Kabupaten Tasikmalaya dan dikeluarkan oleh Kerajaan Galuh<sup>5</sup> tersebut, berisi penetapan daerah *simā* oleh Batari Hyang (Djafar et al., 2016). Dengan demikian, penetapan *simā* di Jawa Barat ketika itu memang lazim terjadi. Mengingat daerah selatan Jawa Barat memang lebih kaya akan mineral dan sumber daya alam. Oleh karena itu, bisa dikatakan bahwa lokasi ditempatkan Prasasti Sang

<sup>5</sup> tetangga sebelah timur Kerajaan Sunda

Hyang Tapak merupakan daerah produksi Kerajaan Sunda masa itu.

Argumentasi kedua yang menjadi penguat dari teori mengenai Prasasti Sang Hyang Tapak adalah keterangan pada manuskrip *Carita Parahyangan* mengenai Kabuyutan Jampang. Dikisahkan bahwa setelah Niskala Wastu Kancana ke takhta Kerajaan Sunda dan Galuh, Bunisora Suradipati yang menjadi pemimpin sementara sebelumnya, kemudian melanjutkan kehidupannya sebagai agamawan dengan nama *Batara Guru di Jampang*. Gelar ini mengindikasikan bahwa sekitar abad ke-14 M, paling tidak di Jampang (sebelah barat tempat penemuan Prasasti Sang Hyang Tapak) memang sudah ada *kabuyutan* (Heryana, 2014). Oleh karena itu, bukanlah hal yang aneh apabila di dalam Prasasti Sang Hyang Tapak, Raja Sri Jayabhupati Jayamanahen mencoba melindungi daerah perdikannya di sekitar wilayah itu. Raja Sunda dalam hal ini telah memberikan semacam wacana kepada masyarakat setempat, bahwa daerah sekitar Prasasti Sang Hyang Tapak merupakan wilayah *simā* yang berada di bawah kuasa dan kepentingan raja.

Selain wacana mengenai kepenguasaan daerah *simā* pada Prasasti Sang Hyang Tapak, wacana mengenai pemeliharaan kekuasaan juga dapat dijumpai pada prasasti tersebut. Keberadaan *sapatha* yang memberikan kesan ancaman pada Prasasti Sang Hyang Tapak merupakan wacana yang menggambarkan bahwa raja memiliki kemampuan untuk menghukum kepada siapa saja yang melanggar kedaulatan kekuasaan raja. Anasir keabsahan genealogis pada beberapa kalimat yang terpotong pada bagian akhir prasasti, juga mengindikasikan bahwa wacana pemeliharaan kekuasaan atas daerah *simā* di Sang Hyang Tapak dilanjutkan pula oleh keturunan Sri Jayabhupati. Dengan demikian, ada asumsi bahwa Prasasti Sang Hyang Tapak tidak dikeluarkan oleh Sri Jayabhupati seorang diri, tetapi juga oleh para penerusnya.

Indikasi ini diperkuat dengan adanya gejala perbedaan bentuk aksara dan penggunaan istilah untuk kata bermakna sama pada Prasasti Sang Hyang Tapak I dan II<sup>6</sup>.

Berbeda dengan Prasasti Sang Hyang Tapak, penelusuran kaitan uraian Prasasti Huludayeuh dengan wacana kekuasaan Raja Sunda lebih banyak berasal dari data sejarah pembanding. Hal ini dikarenakan uraian prasasti yang sedemikian singkat dan sederhana. Adapun dari hasil perujukan data sezaman, dapat diketahui kalau Prasasti Huludayeuh ditempatkan di lahan perbatasan yang berpotensi terjadinya persengketaan. Sejak masa pemerintahan Sri Baduga Maharaja pada abad ke-15 hingga awal abad ke-16, wilayah Cirebon merupakan daerah paling awal berkembangnya ajaran Islam di Jawa Barat (Hernawan & Kusdiana, 2020). Hasil telah dari manuskrip *Bujangga Manik* misalnya, mengindikasikan bahwa wilayah Cirebon abad ke-16 telah memerdekakan diri sebagai kerajaan yang mandiri. Tokoh Ameng Layaran menyebut bahwa Sungai Cimanuk merupakan perbatasan antara entitas suku Jawa dan Sunda, sehingga diasumsikan bahwa wilayah Cirebon kala itu bukan lagi wilayah Kerajaan Sunda (Noorduyn & Teeuw, 2009). Keterangan ini didukung oleh catatan Tome Pires yang menandatangani Kerajaan Sunda pada masa Raja Surawisesa (1521-1535). Ia mencatat bahwa wilayah Cirebon kala itu sudah ada berada di bawah kekuasaan Demak yang beragama Islam (Corteseo, 2018).

Apabila ditinjau kembali uraian pada Prasasti Huludayeuh, wacana yang hendak disampaikan adalah bahwa Raja Sunda (dalam hal ini Sri Baduga Maharaja) memiliki kekuatan untuk memerintahkan seorang tokoh bernama Disi Sukajati untuk menebang pohon, mengusir Udu Basu

---

<sup>6</sup> Perbedaan istilah misalnya, dapat dijumpai pada kata *wuikallangon* dan *watu gde kalih* pada Prasasti Sang Hyang Tapak I dan II, yang sama-sama berarti “dua batu besar”.

dan membunuh Kala. Penyebutan tokoh Udu Basu di Prasasti Huludayeuh pada khususnya menjadi suatu fenomena yang unik, mengingat ia merupakan salah satu tokoh mitologi dalam cerita Dewi Sri dalam kepercayaan masyarakat Sunda. Tokoh Udu Basu dalam khazanah manuskrip Sunda Kuno dapatlah dijumpai pada manuskrip *Wawacan Sulanjana*, sedangkan di Cirebon nama Udu Basu terdapat di *Serat Satriya Budug Basu*. Singkatnya, dikisahkan bahwa Udu Basu merupakan seorang pangeran yang amat mencintai Dewi Sri. Sampai pada suatu ketika Dewi Sri menjelma menjadi tanaman, sehingga sang pangeran pun menjelma menjadi hama yang selalu berdekatan dengan Dewi Sri (Ridwan & Abdulgani, 2012).

Selain tokoh Udu Basu, penyebutan tokoh Kala pada Prasasti Huludayeuh juga menjadi menarik. Kala dalam mitologi Hindu bermula dari kisah pengadukan lautan susu (*samudramanthana*) oleh para dewa dan aśura. Dari hasil pengadukan lautan susu tersebut, muncul Kala Rahu yang hendak mencuri air *amṛta* dari tangan Dewa Wisnu. Niatan ini berhasil dilaksanakan oleh Kala Rahu, namun kemudian diketahui oleh Dewa Surya (Matahari) dan Chandra (Bulan) yang melapor pada Dewa Wisnu. Kala Rahu yang telah meminum air *amṛta* kemudian membalas Surya dan Chandra dengan memakannya, namun Dewa Wisnu ternyata telah melepaskan *chakrasudarsana*-nya untuk menebas leher Kala Rahu. Oleh karena kepala Kala Rahu telah mendapat khasiat dari air *amṛta* (air tersebut belum mengalir ke seluruh tubuh Kala Rahu), akhirnya kepala Kala Rahu selalu mendapatkan keabadian. Sedangkan proses dimakannya Surya dan Chandra kemudian diasosiasikan dengan gerhana bulan dan matahari (Izza et al., 2020).

Berdasarkan beberapa pemaparan di atas mengenai perujukan beberapa uraian di dalam Prasasti Huludayeuh dengan mitologi terkait dan perbandingan dengan konteks

masa dari prasasti tersebut, terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian mengenai wacana kekuasaan dan kaitannya terhadap Prasasti Huludayeuh sebagai panopticon.

Pertama, Raja Sunda dalam Prasasti Huludayeuh berusaha menunjukkan kekuasaannya melalui strategi pamer kekuatan (*show of force*). Melalui Prasasti Huludayeuh, sang raja berusaha menunjukkan keunggulannya dengan menimbulkan kesan bahwa ia memiliki kekuatan magis untuk menghalau mahluk-mahluk yang memberi dampak negatif bagi masyarakat. Pelampiran nama Udu Basu dan Kala dapat ditafsirkan sebagai simbol bahwa Raja Sunda memiliki kemampuan spesifik untuk menghalau hama yang merugikan masyarakat agraris, dan fenomena gerhana yang ditakuti oleh masyarakat.

Kedua, tindakan *show of force* ini juga mengindikasikan adanya kesalahan tafsir dari penelitian sebelumnya, utamanya yang dilakukan oleh Hasan Djafar (1994). Djafar dalam penelitiannya berinterpretasi bahwa puji-pujian di dalam Prasasti Huludayeuh memiliki sifat yang serupa dengan yang ada di dalam Prasasti Batu Tulis. Prasasti Batu Tulis dan Huludayeuh oleh Djafar ditafsirkan sebagai prasasti yang memeringati *sraddha*<sup>7</sup> Raja Sri Baduga Maharaja. Penafsiran ini dilandaskan pada keterangan uraian prasasti yang bersifat puja-puji bagi Raja Sri Baduga Maharaja. Pada akhirnya muncul asumsi bahwa kedua prasasti tersebut dikeluarkan oleh Raja Surawisesa (anak dari Sri Baduga Maharaja). Namun, apabila disandingkan dengan postulat dalam penelitian ini, yang memosisikan uraian Prasasti Huludayeuh, teori Djafar ini menjadi kurang masuk akal. Menurut manuskrip *Carita Parahyangan*, *Carita Purwaka Caruban Nagari*, *Suma Oriental*, dan *Bujangga Manik*, wilayah Cirebon telah memerdekakan diri dari Kerajaan Sunda pada masa pemerintahan

---

<sup>7</sup> Upacara penganumertaan bagi seseorang orang yang telah wafat, yang mana dilakukan 12 tahun pasca kematian sang mendiang (Ratnawati, 2001)

Surawisesa. Dengan demikian mustahil rasanya, apabila Surawisesa menempatkan prasasti *sraddha* ayahnya (yang harusnya sangat suci, karena prasasti yang satu lagi berada di pusat ibukota Pakwan Pajajaran) di wilayah yang bersengketa. Menjadi lebih logis kemudian untuk mengatakan bahwa Prasasti Huludayeuh dikeluarkan pada masa pemerintahan Raja Sri Baduga Maharaja, yang mana memang ketika masa pemerintahannya lah Cirebon masih merintis kekuatan dan belum memerdekakan diri sepenuhnya. Bentuk *show of force* ini dapat ditafsirkan sebagai upaya Sri Baduga Maharaja untuk menginternalisasi kekuasaannya di tengah rakyat yang hidup di daerah yang rawan pemberontakan.

## PENUTUP

Penelitian ini menghasilkan beberapa informasi baru mengenai hubungan pusat Kerajaan Sunda dengan wilayah pinggiran di sekitarnya. Berdasarkan dua temuan prasasti masa Kerajaan Sunda (abad ke-8-16) dari daerah luar ibu kota Kerajaan Sunda yang ditinjau dengan teori panopticon, dapat dijumpai dua bentuk wacana kekuasaan yang berbeda pada uraian kedua prasasti. Perbedaan wacana ini mengindikasikan adanya wilayah pinggiran Kerajaan Sunda yang berfungsi sebagai daerah produksi dan daerah perbatasan. Daerah produksi Kerajaan Sunda diperkirakan berada di sekitaran Kabupaten Sukabumi, yang secara geografis berbatasan dengan laut selatan. Prasasti Sang Hyang Tapak yang ditempatkan oleh Raja Sri Jayabhupati di sana diposisikan sebagai peneguh sekaligus pemelihara kekuasaan raja atas sumber daya yang melimpah di sana. Daerah perbatasan yang dalam hal ini ditandai dengan Prasasti Huludayeuh di Cirebon merupakan lahan rawan konflik. Daerah ini bersinggungan dengan pelabuhan besar dan kerajaan tetangga (Demak dan Majapahit), sehingga menjadi ideal bagi berkembangnya

suatu pusat kekuasaan baru. Melalui Prasasti Huludayeuh, Raja Sri Baduga Maharaja menunjukkan kuasanya melalui strategi *show of force*, yang mana diharapkan mampu berdampak bagi warga sekitar maupun para musuh-musuhnya yang berpotensi melawan kerajaan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Atkinson, J. D. (2017). Qualitative Approaches. In J. D. Atkinson (Ed.), *Journey into Social Activism* (pp. 65–98). Fordham University Press.
- Boechari. (2012). Epigrafi dan sejarah kuno. In *Melacak Sejarah Kuno Indonesia lewat Prasasti* (pp. 3–28). Departemen Arkeologi FIB UI.
- Budimansyah. (2019). *Rekonstruksi Kota Galuh Pakwan (1371-1475 M) dan Kota Pakwan Pajajaran (1482-1521 M)*. Universitas Padjajaran.
- Budimansyah, Sofianto, K., & Dienaputra, R. D. (2018). Sang Hyang Talaga Rena Mahawijaya: Telaga Buatan sebagai Solusi Bencana. *Patanjala : Jurnal Penelitian Sejarah Dan Budaya*, 10(3), 419–434.
- Cortesao, A. (2018). *Suma Oriental: Perjalanan Dari Laut Merah Ke Cina & Buku Francisco Rodrigues*. Penerbit Ombak.
- Danasasmita, S. (2014). *Melacak Sejarah Pakuan Pajajaran dan Prabu Siliwangi*. Penerbit Kiblat Utama.
- Darsa, U. A. (2020). Islam dan Panorama Keagamaan Masyarakat Tatar Sunda. *Jurnal Indo-Islamika*, 7(1), 115–134. <https://doi.org/10.15408/idi.v7i1.14817>
- Djafar, H. (1994). Prasasti Huludayeuh. *Berkala Arkeologi*, 14(2), 197–202.
- Djafar, H. (2011). Prasasti Batu Tulis Bogor. *Amerta: Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Arkeologi*, 29(1), 1–13.
- Djafar, H. (2014). Invasi Sriwijaya ke Bhumijawa: Pengaruh Agama Buddha

- Mahayana dan Gaya Seni Nalanda di Kompleks Percandian Batujaya. *Kalpataru: Majalah Arkeologi*, 23(2), 121–135.
- Djafar, H., Trigangga, Tejowasono, N. S., Rahayu, A., Ambarwati, S., Chaidir, A., & Wardhani, F. (2016). *Prasasti Batu Pembacaan Ulang dan Alih Aksara I*. Museum Nasional Jakarta.
- Foucault, M. (1977). *Discipline and Punish: The Birth of the Prison*. Random House.
- Griffiths, A. (2021). The Sanskrit Inscription of Śaṅkara and Its Interpretation in the National History of Indonesia. *Bijdragen Tot de Taal-, Land- En Volkenkunde*, 177, 1–26.
- Gunawan, A., & Griffiths, A. (2021). Old Sundanese Inscriptions: Renewing the Philological Approach. *Archipel: Études Interdisciplinaires Sur Le Monde Insulindien*, 101, 131–207.
- Haryono, T. (1999). Sang Hyang Watu Teas dan Sang Hyang Watu Kulumpang: Perlengkapan Ritual Upacara Penetapan Sima pada Masa Kerajaan Mataram Kuna. *Humaniora*, 12, 14–21.
- Hernawan, W., & Kusdiana, A. (2020). *Biografi Sunan Gunung Jati: Sang Penata Agama di Tanah Sunda*. LP2M Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati.
- Heryana, A. (2014). Jejak Kepemimpinan Orang Sunda: Pemaknaan dalam Naskah Carita Parahyangan (1580). *Patanjala : Jurnal Penelitian Sejarah Dan Budaya*, 6(2), 163–178.
- Izza, N. A. (2019). Prasasti-prasasti Sapatha Sriwijaya: Kajian Panoptisisme Foucault. *Titian: Jurnal Ilmu Humaniora*, 3(1), 110–123.
- Izza, N. A., Sya'adah, N. A., & Melvidiani. (2020). Karakteristik Kepala Kala di Sumatera: Tinjauan Arkeologi Seni. *Purbawidya: Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Arkeologi*, 9 (2), 131–148.
- Kaplan, M. (1995). Panopticon in Poona: An Essay on Foucault and Colonialism. *Cultural Anthropology*, 10(1), 85–98.
- Kumar, M. (2015). Coolie Lines: A Bentham Panopticon Schema and Beyond. *Proceedings of the Indian History Congress*, 344–355.
- Lubis, N. H. (2013). *Sejarah Kerajaan Sunda*. Yayasan Masyarakat Sejarawan Indonesia (YMSI) Cabang Jawa Barat dan MGMP IPS SMP Kabupaten Purwakarta.
- Maulana, R. (1994). *Data Ikonologis dalam prasasti Jawa Kuna (suatu uraian deskriptif)*.
- McKenzie, N. (1977). Centre and Periphery: The Marriage of Two Minds. *Acta Sociologica*, 20(1), 55–74.
- Mulia, R. (1977). Beberapa Catatan mengenai Arca-arca yang disebut Arca Tipe Polinesia. *Pertemuan Ilmiah Arkeologi I*, 599–646.
- Munandar, A.A. (2017). Tradisi Pemerintahan dan Konsep Raja Ideal menurut Pandangan Masyarakat Sunda Kuna abad ke-13-16 M. In A.A. Munandar (Ed.), *Siliwangi, Sejarah dan Kebudayaan Sunda Kuna* (pp. 103–247). Wedatama Widyastra.
- Munandar, Agus Aris, Fahrudin, D., Sujai, A., & Rahayu, A. (2011). *Bangunan Suci Sunda Kuna*. Wedatama Widyastra.
- Niemeijer, H. E. (2015). Beberapa Catatan untuk Rujukan ke Padjajaran di Arsip VOC yang Disimpan di ANRI. *Makalah Yang Disajikan Dalam Acara Focus Group Discussion (FGD) Rekonstruksi Situs Astana Gede Kawali Dengan Pendekatan Sejarah, Arkeologi, Filologi, Dan Antropologi*.
- Noorduyn, J. (2019). *Perjalanan Bujangga Manik Menyusuri Tanah Jawa: Data*

- Topografis dari Sumber Sunda Kuno*. Ombak.
- Noorduyn, J., & Teeuw, A. (2009). *Tiga Pesona Sunda*. Pustaka Jaya.
- Perdana, G. C., & Wahyudi, W. R. (2020). Rekonstruksi Lanskap Kabuyutan Bandung Utara. *PURBAWIDYA: Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Arkeologi*, 9(1), 1–14. <https://doi.org/10.24164/pw.v9i1.317>
- Pleyte, C. M. (1915). Maharaja Cri Jayabuphati, Soenda's Oudst Bekende Vorst. *Tijdschrift Voor Indische Taal-Land-En Volkenkunde*, 72, 201–218.
- Poesponegoro, M. D., & Notosusanto, N. (2010). *Sejarah Nasional Indonesia Jilid II: Zaman Kuna*. Balai Pustaka.
- Ratnawati, L. D. (2001). Upacara Sraddha pada Masyarakat Tengger. *Amerta: Berkala Arkeologi*, 21, 82–96.
- Ridwan, S., & Abdulgani, F. (2012). Penulisan Cerita Budug Basu di Kalangan Keraton Cirebon. *Manuskripta*, 2(1), 119–138.
- Rosyandi, E., Satria, A., & Saharuddin. (2019). Strategi Aktor dalam Pemanfaatan Sumber Daya Laut di Pelabuhan Ratu Jawa Barat. *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 7(2), 127–136.
- Rudini. (1992). *Buku Profil Propinsi Republik Indonesia*. Yayasan Bhakti Wawasan Nusantara dan Majalah TELSTRA.
- Saptono, N., Widyastuti, E., & Radea, P. (2020). Kajian Pendahuluan Temuan Struktur Bata di Sambimaya, Indramayu. *Tumotowa*, 3(2), 66–77.
- Sarup, M. (2008). *Panduan Pengantar untuk Memahami Poststrukturalisme dan Postmodernisme*. Jalasutra.
- Sumardjo, J. (2019). *Struktur Filosofis Artefak Sunda*. Penerbit Kelir.
- Tjandrasasmita, U. (2009a). Kesultanan Cirebon: Tinjauan Historis dan Kultural. In *Arkeologi Islam Nusantara* (pp. 159–176). Kepustakaan Populer Gramedia dan EFEO.
- Tjandrasasmita, U. (2009b). Melacak Jejak Arkeologis Banten. In T. Hartimah, A. Chair, Testriono, O. Dahuri, & S. Sulaiman (Eds.), *Arkeologi Islam Nusantara* (pp. 109–119). Kepustakaan Populer Gramedia dan EFEO.
- Trigangga. (2015). *Prasasti & Raja-Raja Nusantara*. Museum Nasional Jakarta.
- van Bemmelen, R. W. (1949). *The Geology of Indonesia: General Geology of Indonesia and Adjacent Archipelagos Vol. 1a*. Martinus Nijhoff.
- Zakaria, M. M. (2012). Sri Baduga Maharaja (1482-1521): Tokoh Sejarah yang memitos dan melegenda. *Seminar Sri Baduga Dalam Sejarah, Filologi, Dan Sastra Lisan*, 1–17.
- Zoetmulder, P. J. (1982). *Kamus Bahasa Jawa Kuno*. Gramedia Pustaka.